



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2019 - 2023**

KABUPATEN MAGETAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Teuku Umar No. 55, Magetan**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 LANDASAN HUKUM	3
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	10
	2.2 SUMBER DAYA DINAS PERANGKAT DAERAH.....	17
	2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	23
	2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	33
	3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	33
	3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	34
	3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	34
	3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Dan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	42
	3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	44
	4 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	44
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII	PENUTUP	68

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Disamping itu, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, ayat (2) : “ Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Begitu pula sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang diakibatkan karena adanya berbagai penyesuaian diantaranya penyesuaian dengan RPJMN Tahun 2020-2024, terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terjadinya Pandemi covid 19.

Dengan diterbitkannya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun secara umum substansi dari Perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

Fungsi Renstra (Perencanaan Strategis) antara lain :

- a. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b. Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- d. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya

Tahapan Penyusunan Rencana strategis sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Keterkaitan dengan RPJMD
Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dengan demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam renstra ini mengacu pada RPJMD.
2. Keterkaitan dengan Renstra K/L
Dokumen Renstra K/L harus tetap dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana selain sasaran Renstra harus mengacu pada RPJMD juga tetap harus selaras dengan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra K/L.
3. Keterkaitan dengan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
Renstra merupakan dokumen 5 tahunan yang menggambarkan tentang arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mengimplementasikan RPJMD. Namun demikian, agar Renstra dapat dioperasionalkan, maka perlu dirumuskan ke dalam Renja.
4. Keterkaitan dengan Penganggaran
Renstra yang telah dijabarkan ke dalam Renja akan menjadi landasan untuk perumusan RKA – PD, yang selanjutnya dijadikan landasan untuk perumusan DPA – PD sebagai lampiran APBD yang penyusunannya harus sejalan dengan RKPD.
5. Keterkaitan dengan Evaluasi
Untuk mengetahui capaian target kinerja Renstra maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Renja. Dengan demikian, maka untuk mengetahui capaian kinerja renstra perlu dilakukan evaluasi pada dokumen Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor);
 22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Perangkat Daerah

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Mengemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan.
2. Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
4. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
5. Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB.VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB.VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magetan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi

- 1) pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- 2) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 3) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- 4) pengelolaan urusan kepegawaian;
- 5) pengelolaan urusan keuangan;
- 6) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 7) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- 8) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi

- pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- melaksanakan urusan surat-menyurat;
 - membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
 - melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
 - melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
 - menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
 - mengurus kesejahteraan pegawai;
 - merencanakan pengelolaan arsip; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
 - menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
 - melaksanakan tata usaha keuangan;
 - memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
 - melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
 - menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
 - menyusun laporan keuangan;
 - melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
 - menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (Renja);
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 - menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
 - menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - mengelola dokumen perjanjian kinerja;
 - mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

- menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi :

- penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia;
- perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga IMP (PPKBD dan Sub PPKBD);
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

a. Seksi Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk

mempunyai tugas :

- mengumpulkan, menyusun, dan memadukan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan;
- menyusun perencanaan, pemetaan, perkiraan pengendalian penduduk;
- menyusun rencana kegiatan demografi dan statistik;
- melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk ;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian penduduk; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- mengumpulkan dan menyusun metode penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- melaksanakan advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) sesuai kearifan budaya lokal;
- mengembangkan kegiatan lain terkait dengan metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan advokasi dan motivasi keluarga;
- melaksanakan koordinasi dalam program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi;
- melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- melaksanakan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga PPKBD dan Sub PPKBD;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi program advokasi, penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Keluarga Berencana dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.

Fungsi :

- penyusunan program jaminan, perumusan kebijaksanaan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana ;
- perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- pelaksanaan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta;
- menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan pelayanan Keluarga Berencana;

- pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana;
- penyusunan kebijakan, strategi, dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan masalah reproduksi;
- pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :

a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- melaksanakan program jaminan, kebijaksanaan teknis dan strategi operasional pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon), penanggulangan efek samping dan kegagalan alat dan obat kontrasepsi;
- melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penjaminan program Keluarga Berencana;
- mengembangkan metode lain dalam akselerasi program jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Keluarga Berencana; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- menyusun dan merumuskan kebijaksanaan teknis program, dan strategi operasional pembinaan kesertaan Keluarga Berencana;
- menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
- merumuskan kebijakan teknis dan strategi operasional pembinaan kesertaan Keluarga Berencana termasuk peningkatan peran serta;
- melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dan perlindungan masalah reproduksi;
- melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluargaberencana;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dan perlindungan masalah reproduksi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Fungsi :

- penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan ketahanan keluarga;
- penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- peningkatan dan pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi lain dan lembaga / organisasi kemasyarakatan;
- pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- penyampaian laporan kegiatan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha;
- penyusunan pedoman pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia;
- pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia; dan
- pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara struktural membawahi Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Seksi Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia.

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- menyusun rencana, pedoman teknis dan operasional pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- melaksanakan pemeriksaan kelayakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- mengusulkan ketetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
- melaksanakan pengawasan dan pembinaan;
- melaksanakan promosi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia mempunyai tugas :

- menyusun pedoman teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

- melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, termasuk peningkatan peran serta;
- mengintegrasikan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan integrasi program Genre, kepramukaan, dan PIK R/M;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja, dan lansia, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender.

Fungsi :

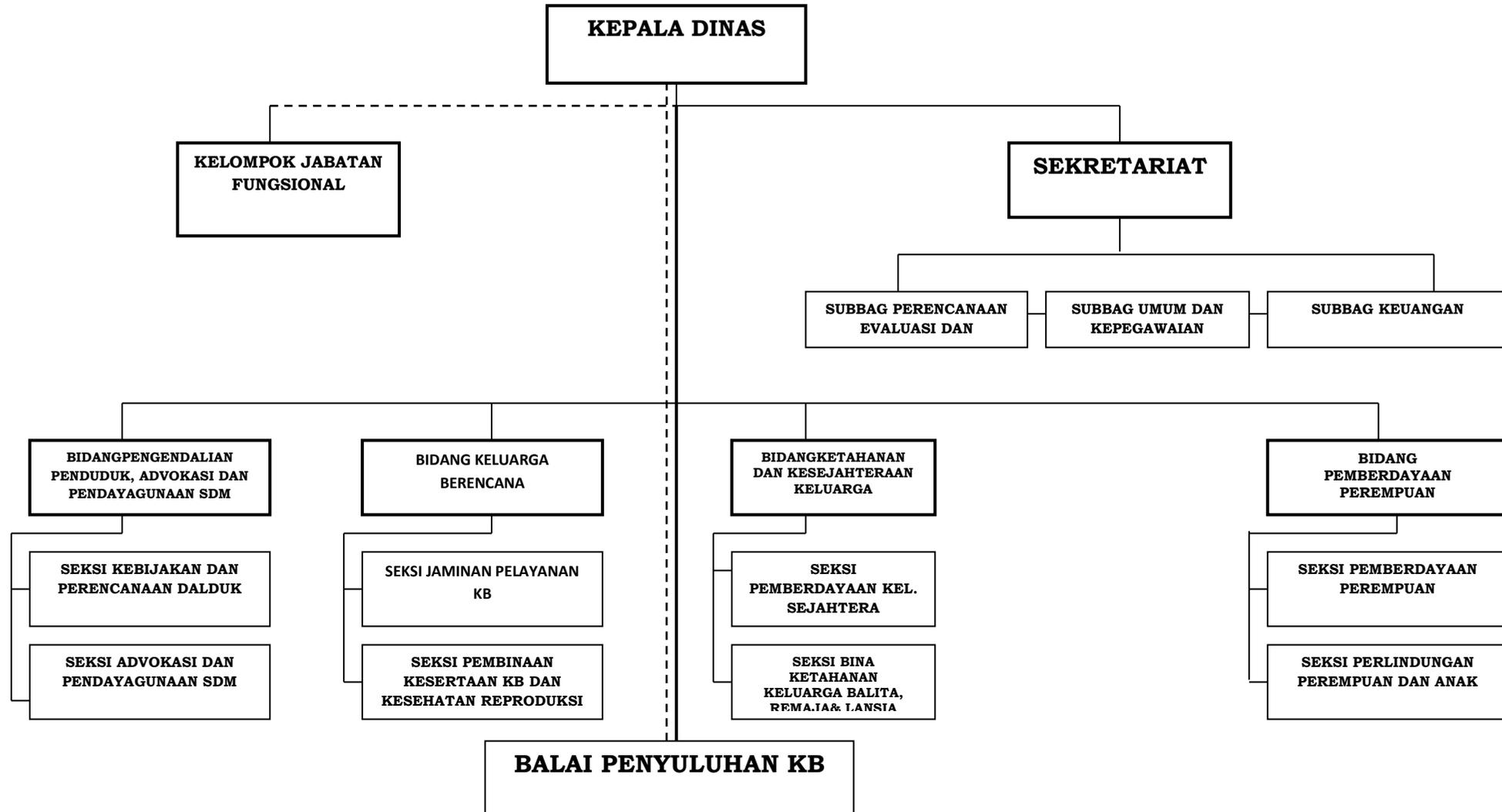
- penyusunan produk hukum dan pedoman teknis program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pengumpulan bahan dan atau data basis untuk penyusunan rencana operasional dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pelaksanaan dan fasilitasi program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pengoordinasian program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pengintegrasian upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak;
- pembinaan dan koordinasi penyelesaian korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- pelaksanaan analisa dan penilaian program/kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- penyampaian laporan kegiatan program / kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :
 - mengumpulkan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan;
 - melaksanakan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, dan penguatan ekonomi perempuan;
 - melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - melembagakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
 - melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarus utamaan gender (PUG);
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
 - merumuskan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama dengan para pihak/instansi lain;
 - menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan perempuan dan anak yang diperdagangkan;
 - melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi tentang program pengarusutamaan hak anak (puha);
 - menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program perlindungan perempuan dan anak;
 - memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian korban kekerasan pada perempuan dan anak;
 - mengelola dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PPKB DAN PPPA**



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	1
4.	IV/b	1
5.	IV/a	4
6.	III/d	12
7.	III/c	2
8.	III/b	1
9.	III/a	1
10.	II/d	3
11.	II/c	1
	Jumlah	26

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas PPKB dan PPPA Kab Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	4
4.	Kasubag	IV.a	3
5.	Kasubid	IV.a	8
6.	Staf/Pelaksana	-	9
	Jumlah		26

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas PPKB dan PPPA Kab Magetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	5
2.	Strata 1 (S1)	16
3.	Sarjana Muda (D3)	-
4.	SLTA	5
	Jumlah	26

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Dinas PPKB dan PPPA Kab Magetan*

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Diklatpim Tk. II	-
2.	Diklatpim Tk. III	2
3.	Diklatpim Tk.IV	12
	Jumlah	14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PPKB dan PPPA Kab Magetan

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PPKB dan PPPA Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor (2 lantai)	Unit	1
2.	Balai penyuluhan KB/UPTD PKS	Unit	18
3.	Kendaraan dinas roda 4	unit	9
4.	Kendaraan roda 2	Unit	118
5.	Mesin Ketik Manual	Unit	10
6.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	-
7.	Mesin Hitung Manual	Unit	-
8.	Mesin Kalkulator	Unit	-
9.	Mesin Foto Copy	Unit	-
10.	Mesin Jilid	Unit	-

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
11.	Mesin penghancur kertas	Unit	4
12.	Mesin Penghisap Debu	Unit	1
13.	Lemari Besi/Metal	Unit	17
14.	Lemari Kayu	Unit	8
15.	Lemari Kaca	Unit	12
16.	Lemari Sorok	Unit	-
17.	Lemari Es	Unit	-
18.	Rak Besi/Metal	Unit	14
19.	Rak Kayu	Unit	1
20.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	11
21.	Brankas	Unit	2
22.	Meja Kayu	Unit	4
23.	Meja Rapat	Unit	12
24.	Meja Tulis	Unit	25
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2
26.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	4
27.	Meja Komputer	Unit	20
28.	Kursi Kayu	Unit	2
29.	Kursi Besi/Metal	Unit	-
30.	Kursi Rapat	Unit	137
31.	Kursi Putar	Unit	25
32.	Kursi Lipat	Unit	-
33.	Kursi Biasa	Unit	5
34.	Papan Visual	Unit	1

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
35.	Whiteboard	Unit	4
36.	Peta	Unit	-
37.	Alat Pemotong Kertas	Unit	1
38.	Gorden/Tirai	Unit	-
39.	Teralis	Unit	-
40.	Karpet/Permadani	Unit	-
41.	Tangga Alumunium	Unit	1
42.	AC	Unit	11
43.	Dispenser	Unit	2
44.	Kipas Angin	Unit	4
45.	Ex House Fan	Unit	10
46.	Radio	Unit	-
47.	Televisi	Unit	2
48.	LCD Projector	Unit	8
49.	Tripod Screen LCD Projector	Unit	2
50.	Layar Focus	Unit	-
51.	Slide Projector	Unit	2
52.	Camera Digital	Unit	5
53.	Camera Video	Unit	-
54.	Tripod Camera	Unit	-
55.	Lensa Camera	Unit	-
56.	Handy Cam	Unit	-
57.	Personil Computer	Unit	-
58.	Laptop	Unit	31

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
59.	Note Book	Unit	-
60.	Hard Disk	Unit	-
61.	Keyboard	Unit	-
62.	Printer	Unit	47
63.	CPU	Unit	47
64.	Monitor	Unit	47
65.	Power Supply	Unit	-
66.	Step Up/Down	Unit	-
67.	Memory Programer	Unit	-
68.	Laser Destance Meter	Unit	-
69.	Ploter	Unit	-
70.	Server	Unit	-
71.	Router	Unit	-
72.	Modem	Unit	-
73.	Audio Amplifier	Unit	-
74.	Audio Monitor Active	Unit	-
75.	Umintimuptible Power Suply (UPS)	Unit	-
76.	Battery Charger	Unit	-
77.	Time Switching	Unit	-
78.	Pesawat Telepon	Unit	1
79.	Faximile	Unit	1
80.	Tower Antena	Unit	-
81.	Antena Penerima VHP	Unit	-
82.	Antena Acces Poin (WIFI)	Unit	-

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
83.	Antena Grid	Unit	-
84.	Antena Omni	Unit	-
85.	Mesin Power Station White Emergency Diesel Generating	Unit	-

Sumber : Pengurus Barang Dinas PPKB dan PPPA Kab Magetan ini.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas PPKB dan PPPA telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas PPKB dan PPPA Tahun 2018-2023. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Dinas PPKB dan PPPA periode 2013-2018 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Dinas PPKB dan PPPA tahun 2018-2023.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pembangunan Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indicator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio capaian pada Tahun Ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
a	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Rasio KDRT				1:2110	1:2112	1:2701	1:1761	1,04	9,71
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan				78,6	78,6	86,08	87,24	109,51	111,00
3	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)				670	680	826,13	826,13	123,30	121,48
4	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah				4,76	4,77	4,82	4,31	101,26	90,35
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR				6,67	7,67	13,33	11,11	199,85	144,85
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				76,92	77,01	76,92	63,70	100,00	82,71
b	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				0,21	0,20	0,168	0,168	80,00	80,00
2	Total Fertlity Rate (TFR)				2,17	2,16	2,16	2,10	99,54	97,23
3	Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR)				76,5	76,7	70,44	72,98	91,95	95,14
4	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita				20,10	20,30	23,34	23,12	116,11	113,89
5	Persentase Wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)				8	8,00	9,07	9,30	113,38	116,25

2.3.1 Rasio KDRT

a. Rasio KDRT

Target Rasio KDRT pada tahun 2019 sebesar 1:2110 realisasinya sebesar 1:2701%, sedangkan pada tahun 2020 target sebesar 1:2112 realisasinya 1:1761%. Rasio KDRT dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah kasus KDRT pada tahun 2019 sebesar 78 dengan jumlah KK sebesar 243.071 sedangkan Jumlah kasus KDRT tahun 2020 sebesar 138 dengan jumlah KK 243.071

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 target sebesar 78,60% dan realisasi sebesar 86,08%, sedangkan pada tahun 2020 target sebesar 76,60% dan realisasinya 87,24%, Dari Tabel diatas angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan

c. Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)

Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2019 target sebesar 670 dan realisasinya sebesar 826,13 sedangkan tahun 2020 target sebesar 680 dan realisasinya sebesar 826,13. Hal ini disebabkan adanya dukungan dari Dinas Instansi Lintas Sektor

d. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2019 target sebesar 4,76 dan realisasinya sebesar 4,82% sedangkan pada tahun 2020 target sebesar 4,77 dan realisasinya sebesar 4,31%, sehingga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya PNS Perempuan yang Purna Tugas.

e. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD dapat diketahui dari perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dan jumlah total anggota DPRD di Kabupaten Magetan. Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi perempuan yang menduduki kursi DPRD. Target pada tahun 2019 sebesar 6,67 realisasinya 13,33% sedangkan tahun 2020 target sebesar 7,67 realisasinya 11,11%. Hal ini disebabkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan

f. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu ini dapat diketahui dari jumlah pengaduan atau laporan yang diselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2019 target sebesar 76,92 realisasi sebesar 76,92%, sedangkan tahun 2020 target sebesar 77,07% dan realisasinya 63,70% d

Adanya penurunan ini disebabkan penyesuaian anggaran melalui refocusing untuk penanganan pandemic covid-19.

2.3.2 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUN KELUARGA BERENCANA

a. Total Fertility Rate (TRF)

Total Fertility Rate (TFR) jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa akhir reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Secara mudah TFR adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Pada tahun 2019 target sebesar 2,17 realisasi 2,16 sedangkan pada tahun 2020 target sebesar 2,16 realisasinya sebesar 2,10.

b. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Target Rata rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2019 sebesar 20,10 realisasinya sebesar 23,23%. Pada tahun 2020 target sebesar 20,30 relaisainya sebesar 23,12%.

Peningatan rata-rata usia kawin pertaama wanita disebabkan semakin banyaknya kelompok-kelompok PIK Remaja disetiap Desa/Keluarhan baik melalui jalur pendidikan maupun jalur masyarakat. Kemudian dengan adanya dukungan dari stack holder dan dukungan dana dari dana ADD, melalui program PKK.

c. Persentase Wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)

Persentase Wanita berusia 20 - 24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun pada tahun 2019 target sebesar 8 realisasinya sebesar 9,07% sedangkan tahun 2020 target sebesar 8,00 relaisasinya sebesar 9,30%.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Magetan

URAIAN (Program/Kegiatan)	ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUNKE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah	150.000.000	79.260.361	146.321.336	58.459.110	97,55	73,71	-2,45	-26,24
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	15.000.000	0	15.000.000	0	100	0	0,00	0
Penyediaan Jasad Pelayanan Administrasi Perkantoran	350.000.000	295.830.000	317.550.537	289.455.776	90,73	97,85	-9,27	-2,15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	125.000.000	99.400.000	121.637.051	95.024.378	97,31	95,60	-2,69	-4,40
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	150.000.000	53.671.750	148.256.850	52.743.250	98,84	98,27	-1,16	-1,72
Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Kelompok Sebaya DiLuar Sekolah	184.620.000	0	182.033.220	0	98,60	0	-1,40	0
Pengadaan PerlengkapanKantor	50.000.000	0	50.000.000	0	100	0	0,00	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	15.000.000	28.086.032	11.814.900	93,62	78,77	-6,37	-21,23
Evaluasi Dan Rencana Operasional Program PPKB DAN PPPA (RAKERDA)	45.000.000	0	34.497.200	0	76,66	0	-23,33	0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10.000.000	10.000.000	9.968.000	10.000.000	99,68	100	-3,20	0,00
Program Keluarga Berencana								
Pelayanan KIE	50.000.000	0	49.214.500	0	98,43	0	-1,57	0
Kegiatan Pembinaan Kelompok KB (PMKK)	30.000.000	11.909.500	29.604.147	10.254.500	98,68	86,11	-1,31	-13,89
Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	80.000.000	23.079.150	78.795.829	16.779.150	98,50	72,71	-1,50	-27,29
Fasilitasi Kasus Komplikasi / Kegagalan KB	20.000.000	12.750.000	17.598.000	11.936.150	87,99	93,62	-12,01	-6,38
Biaya Operasional Distribusi Alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (DAK NON FISIK)	0	91.352.000	0	22.394.500	0	24,52	0	-75,48
Program Pelayanan Kontrasepsi								
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	100.000.000	63.483.150	99.145.800	59.849.350	99,15	94,28	-0,85	-5,72
Program Kesehatan Reproduksi								
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan Pap Smear)	70.000.000	41.950.500	68.778.900	40.699.300	98,26	97,02	1,74	-2,98
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan								
Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	90.000.000	58.080.000	89.790.000	55.462.400	99,77	95,50	-0,23	-4,50
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								

Evaluasi Pelaksanaan PUG	50.000.000	24.580.000	46.786.000	23.673.700	0,94	0,97	-6,42	-3,68
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2T-P2A)	120.000.000	58.540.000	106.234.940	52.918.647	0,89	0,91	-11,47	-9,60
Penyusunan Profil Gender dan Anak	20.000.000	0	17.250.000	0	0,87	0	-13,75	0
Program Peningkatan Peran serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan								
Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam mengelola usaha	55.000.000	0	51.047.250	0	0,93	0	-7,18	0
Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	40.000.000	0	38.069.000	0	0,96	0	-4,82	0
Pelatihan Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender	25.000.000	0	21.823.000	0	0,88	0	-12,70	0
Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB								
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Bidang KB	240.001.000	0	239.386.000	0	99,75	0	-0,25	0
Pengadaan Sarana Kerja Bagi PPKBD	197.600.000	528.000.000	181.244.800	350.262.000	91,73	66,34	-8,27	-33,66
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)	0	21.100.000	0	20.447.000	0	96,91	0	-0,30
Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	161.200.000	101.470.000	160.160.000	100.320.000	99,36	98,87	-16,22	-10,26
Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK)	0	75.000.000	0	74.167.500	0	98,89	0	-7,58
Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK)	0	82.500.000	0	81.345.000	0	98,60	0	1,4
Peningkatan Daya Jangkauan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan Sarana kerja, Penggerakandan Pembinaan Program KKBPK	5.071.827.000	0	4.332.605.314	0	85,43	0	-14,57	0

Program Pengendalian Penduduk								
Biaya Umum Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	20.000.000	38.150.000	16.077.750	34.399.000	80,39	90,17	-19,61	-4,19
Dukungan Media KIE dan Manajemen Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK NON FISIK)	0	1.604.340.000	0	1.595.419.650	0	99,45	0	0,05
Pendataan Keluarga	90.000.000	32.334.800	85.410.745	31.485.095	94,90	97,38	-5,09	-2,62
Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK NON FISIK)	0	1.488.636.000	0	1.237.406.800	0	83,13	0	-16,88
Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	20.000.000	0	16.200.690	0	81,00	0	-19,00	0
Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Lini Lapangan								
Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	30.000.000	29.300.000	29.669.800	29.300.000	98,90	100	-1,10	0,00
Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD DAN SUB PPKBD	880.700.000	524.450.000	880.574.500	524.450.000	99,99	100	-0,02	0,00
Program Bina Ketahanan Keluarga								
Pembinaan Kader Bina Keluarga	250.000.000	149.440.000	247.424.800	148.388.575	98,97	99,33	-1,03	-0,71
Program Generasi Berencana								
Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	54.300.000	37.600.000	51.824.750	37.067.000	95,45	98,59	-4,55	-1,41
Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera								
Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kelompok UPPKS	60.000.000	25.000.000	59.938.150	23.681.000	99,89	94,72	-0,10	-5,27

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sebagai berikut:

- a. Ratio kekurangan Petugas PLKB
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemakaian alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- d. Kurangnya Sosialisasi dan motivasi yg dilakukan Penyuluh KB tentang kebijakan-kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait Pendewasaan Usia Perkawinan dan pembinaan kesejahteraan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- c. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Adanya dukungan dari BKKBN terkait pendayagunaan Penyuluh KB.
- e. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Magetan terkait Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait dengan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Meskipun TFR rendah tetapi unmetneed masih tinggi dan peserta KB MKJP rendah, hal ini dapat menjadi peluang besar untuk kenaikan TFR.
 - 2) Peserta KB baru belum bisa dijadikan peserta tambahan pada peserta KB aktif, hal ini dikarenakan tingginya angka drop out/DO
 - 3) Kualitas kepesertaan ber-KB MKJP masih rendah, hal ini terbukti dari rendahnya peserta KB MKJP
 - 4) Masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan KB MOW dan MOP
 - 5) Rendahnya partisipasi dan komitmen pria terhadap program KB, hal ini terlihat dari peserta KB pria yang masih sangat rendah
 - 6) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga harus ditingkatkan, hal ini terbukti dari jumlah PUS dengan usia istri < 20 tahun masih tinggi.
- b. Permasalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Masih rendahnya partisipasi remaja dalam pembinaan kesehatan reproduksi
 - 2) Belum optimalnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.
- c. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Belum optimalnya OPD yang melakukan PUG
 - 2) Masih rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif
 - 3) Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
 - 4) Masih rendahnya Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
 - 5) Belum adanya pemberdayaan perempuan terhadap lansia perempuan
 - 6) Belum adanya penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan
 - 7) Belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pokok PUG
- d. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- e. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti

- pornografi, pelecehan seksual dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- 2) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 3) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah *MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA* Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah .Masyarakat Yang Sejahtera yang berarti melalui Program dan Kegiatan pada Dinas PPKB dan PPPA diharapkan masyarakat Magetan bisa lebih sejahtera

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Adil.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah mendukung pencapaian misi ke satu (satu) yaitu **Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).**

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Dinas P3A dan K Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perintah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

2. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan Badan Induk dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, oleh karena itu terdapat korelasi antara berbagai pokok-pokok bahasan dokumen dari kedua instansi pemerintahan tersebut. Secara hirarkis, seluruh kebijakan yang terkait mengenai

program dan kegiatan dari BKKBN akan diturunkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan adanya sinergitas antara BKKBN dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan dengan tujuan dan sasaran BKKBN yang selanjutnya oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diturunkan menjadi sasaran melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 ini adalah

a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

b. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Persentase pemakaian kontrasepsi*

2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: (1) *Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)* dan (2) *Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)*

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

a. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)*

4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana

Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah

a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: *Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)*

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	husus kepada anak	ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga		
	b. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)	a. Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), b. Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun c. rendahnya kesertaan KB Pria,	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran dan minat masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang dan partisipasi KB pria masih rendah Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM lapangan tidak memadai kebutuhan dan kurang kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dukungan sarana prasarana operasional dari pemerintah pusat dan daerah.
2.	a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya alkon di faskes KB
	b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)	Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja,	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tertibnya peserta KB untuk kontrol ke petugas kesehatan KB 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan KIE KB oleh petugas KB
3.	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya perkawinan usia muda Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pengaruh sosial media dan 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pembinaan dan KIE tentang kesehatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	(ASFR 15 - 19 tahun)	15-19 tahun masih tinggi, <ul style="list-style-type: none"> • terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 	lingkungan pergaulan	reproduksi dan keluarga sejahtera
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi penduduk dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; • Data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat sosial ekonomi mempengaruhi keinginan untuk mempunyai anak lebih dari 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dan komitmen dari kepala daerah terhadap program KKBPK

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupabten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasinya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas PPKB dan PPPA tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tidak berimplikasi langsung terhadap lingkungan. Pada Bab 4 Hasil Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berkaitan dengan Dinas PPKB dan PPPA ada beberapa indikator TPB yang **sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional** adalah sebagai berikut :

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dengan target (isu strategis) sebagai berikut :

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Sedangkan indikator TPB yang **sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional** adalah sebagai berikut :

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dengan target (isu strategis) sebagai berikut :

1. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
2. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
3. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
4. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan dan perlindungan perempuan.
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan tingginya peserta KB aktif tetapi peserta KB MKJP masih rendah dan unmet need tinggi (3) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB dan rendahnya peserta KB pria;.
5. Perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang ditandai dengan masih banyaknya perkawinan dengan usia wanita < 20 tahun.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah adalah : Meningkatkan kualitas SDM dengan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat seperti yang tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Magetan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut

Tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Pengendalian Penduduk

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut:

- 1.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dengan indicator Total Fertility Rate (TFR)
- 1.2 Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan indicator 1.2.1. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)
1.2.2. Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)

2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- 2.1 Menurunnya Rasio KDRT dengan Indikator Rasio KDRT
- 2.2 Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan indikator Partisipasi angkatan kerja perempuan
- 2.3 Meningkatnya Persentase Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan Indikator Persentase Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)
- 2.4 Meningkatnya Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah dengan Indikator Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah
- 2.5 Meningkatnya Proporsi Kursi yang di duduki perempuan di DPRD dengan Indikator Proporsi Kursi yang di duduki perempuan di DPRD
- 2.6 Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dengan Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Magetan disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel. 2.5
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKATDAERAHDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
2019-2023

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pengendalian Penduduk		1.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1.1	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18
		1.1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1.1.1	Fotal Fertility Rate (TFR)	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13
		1.2	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1.2.1	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	20.10	20.30	20.50	20.80	21.00
				1.2.2	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)	8,00	8,00	7,80	7,80	7,50
2	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak			2.1	Indek Peberdayaan Gender (IDG)	61,35	63,36	61,37	61,38	61,39
		2.1	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.1.1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6

				2.2.1	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	4,76	4,77	4,78	4,79	4,80
				2.3.1	Proporsi Kursi yang di duduki Perempuan di DPRD	6,67	7,67	8,67	9,67	10,67
		2.2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	2.4.1	Rasio KDRT	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
				2.5.1	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	670	680	690	700	710
				2.6.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	76,92	77,01	77,25	77,55	77,91

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam mencapai sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel .26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas PPKB dan PPPA
Tahun 2019 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Pengendalian Penduduk	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia	Pengadaan sarana kerja bagi Kader Bina Keluarga dan meningkatkan pembinaan bagi kader-kader Bina Keluarga
			Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR	Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat
			Peningkatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPKS untuk menjadi peserta KB dan dalam	Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UPPKS

			rangka peningkatan ekonomi keluarga	
			Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan) serta penguatan lembaga dan organisasi di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.	Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas dengan didukung kerja sama yang baik dengan stakeholder serta memperkuat lembaga dan organisasi yang mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif, kreatif dan inovatif guna meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
2	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak	Menurunnya Rasio KDRT Meningkatnya Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan

		<p>yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</p> <p>Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan</p> <p>Meningkatnya Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah</p> <p>Meningkatnya Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD</p>	<p>Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</p> <p>Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya</p>	<p>Perlindungan perempuan.</p> <p>Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik dan sosial budaya</p> <p>Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.</p>
			<p>Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</p>	
			<p>Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>Penguatan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak</p>

			<p>Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA</p>	<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada penyusunan regulasi dan kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel Tc. 27.
Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Dinas PPKB PPPA
Kabupaten Magetan

Tabel Tc. 27.
Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan Dinas PPKB PPPA
Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1.1.1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan %	100		130.000.000	100	3.163.460.800	100	345.950.000	100	260.515.000	100	355.000.000	400	4.254.925.800	DPPKBP3A		
Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui Pengendalian Penduduk		1.1.1.1	Pendataan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Dokumen	5	1	90.000.000	1	32.334.800								2	122.334.800	DPPKBP3A	
		1.1.1.2	Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pertemuan Koalisi Kependudukan Kegiatan	20	4	20.000.000	4	-								8	20.000.000	DPPKBP3A	
		1.1.1.3	Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelenggaraan DAK Bidang Pengendalian Penduduk %		100	20.000.000	100	38.150.000									200	58.150.000	DPPKBP3A
		1.1.1.4	Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya Di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di kampung KB %	100			100	1.488.636.000									100	1.488.636.000	DPPKBP3A
		1.1.1.5	Dukungan Media KIE dan Manajemen Bantuan Operasional KB	Persentase dukungan media KIE dan manajemen Bantuan Opaerasional Keluarga Berencana dan Jumlah kader PPKBD/Sub PPKBD yang menerima biaya operasional KIE dan honor pelaksanaan KIE				100	1.604.340.000									100	1.604.340.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase ketersediaan Data kependudukan						100	5.000.000	100	38.500.000			200	43.500.000	DPPKBP3A
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						3	5.000.000		38.500.000			3	5.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal								1	38.500.000			1	38.500.000	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data kependudukan						100	340.950.000	100	222.015.000			200	562.965.000	DPPKBP3A
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan						1	10.000.000					3	10.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga								1	42.000.000			1	42.000.000	
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Keluarga						1	330.950.000					1	330.950.000	DPPKBP3A
				Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga								1	33.615.000			1	33.615.000	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Dukungan Pembiayaan dan Pengelolaan BOKB dan Penurunan Stunting								12	146.400.000			12	146.400.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	-	DPPKBP3A
		1.1.2	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	Cakupan tenaga lini lapangan yang kompeten %	100		910.700.000	100	553.750.000							100	1.464.450.000	DPPKBP3A
		1.1.2.1	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kali	60	12	30.000.000	12	29.300.000							24	59.300.000	DPPKBP3A
		1.1.2.2	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi Honorarium (dan pembinaan) Orang	6.877	1.375	880.700.000	1.377	524.450.000							2752	1.405.150.000	DPPKBP3A
		1.1.3	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	35		100.000.000	27	63.483.150							27	163.483.150	DPPKBP3A
		1.1.3.1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Akseptor	1.750	400	100.000.000	350	63.483.150							750	163.483.150	DPPKBP3A
		1.1.4	Program Keluarga Berencana	Prosentase Capaian CPR %	73,5		180.000.000	73	2.107.498.650							73	2.287.498.650	DPPKBP3A
		1.1.4.1	Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Revitalisasi program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan	30	6	80.000.000	6	23.079.150							12	103.079.150	DPPKBP3A
		1.1.4.2	Pelayanan KIE	Jumlah Calon peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE Akseptor	550	110	50.000.000	110	-							220	50.000.000	DPPKBP3A
		1.1.4.3	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan kelompok keluarga KB Orang	465	100	30.000.000	65	11.909.500							165	41.909.500	DPPKBP3A
		1.1.4.4	Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	Jumlah Fasilitasi Kasus Komplikasi/kegagalan KB Kali	40	20	20.000.000	8	12.750.000							28	32.750.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.1.4.5	Biaya Operasional Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional pada Balai Penyuluhan KB %			- 100		1.968.408.000							100	1.968.408.000	DPPKBP3A
		1.1.4.6	Biaya Operasional Distribusi Alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan KB (DAK Non Fisik)	Jumlah Faskes Keluarga Berencana Yang Mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi %			- 100		91.352.000							100	91.352.000	DPPKBP3A
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR						73,02	6.484.380.000	73,03	4.463.853.398			146	10.948.233.398	DPPKBP3A
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR						100	280.052.000	100	1.161.578.000			200	1.443.630.000	DPPKBP3A
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						12	42.000.000	12	31.500.000			24	73.500.000	DPPKBP3A
			Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Persentase Dukungan Manajemen BOKB dan Media KIE						100	210.552.000					100	210.552.000	DPPKBP3A
			Pengendalian Program KKBPK	Persentase Penyelenggaraan DAK Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana						100	120.278.000 comma					100	27.500.000	DPPKBP3A
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi	Prosentase Pertemuan Rapat Koordinasi								100	280.800.000			100	280.800.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya															
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang Mendapat Dukungan Operasional Kegiatan								18	729.000.000			8	729.000.000	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR						100	1.796.250.000	100	1.711.835.098			200	1.891.455.098	DPPKBP3A
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemberian Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/ Sub PPKBD						100	1.128.000.000					100	1.128.000.000	DPPKBP3A
				Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								100	1.228.015.000			100	1.228.015.000	
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								12	35.000.000			12	35.000.000	DPPKBP3A
			Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD diberi honorarium (dan pembinaan)						1378	668.250.000					1378	668.250.000	DPPKBP3A
				Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								1378	448.820.098			1378	448.820.098	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten /						73	3.462.906.000	73	1.148.440.300			219	4.611.346.300	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian CPR														
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang Terdistribusi Alokon						37	87.061.000	37	16.650.000	-	-	74	103.711.000	DPPKBP3A
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB						200	45.000.000					200	45.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang								2386	1.057.890.300			2386	1.057.890.300	
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						20	25.000.000	20	17.500.000			40	42.500.000	DPPKBP3A
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						24	296.000.000		-		-	24	296.000.000	DPPKBP3A
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah calon peserta KB yang mendapatkan Pelayanan KIE						70	20.000.000					70	20.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB								70	14.000.000			70	14.000.000	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Calon Akseptor yang terlayani KB MKJP						4591	1.650.022.000		-		-	4591	1.650.022.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Telaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan KB di Faskes								37	14.400.000			37	14.400.000	
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta Papsmeas yang terlayani						225	18.335.000					225	18.335.000	DPPKBP3A
				Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan								225	28.000.000			225	28.000.000	
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang Mendapat Biaya Operasional						18	1.321.488.000		-	-	-	18	1.321.488.000	DPPKBP3A
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR						63	945.172.000	63	442.000.000			189	1.427.172.000	DPPKBP3A
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						3	32.500.000	3	28.000.000			6	60.500.000	DPPKBP3A
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Prosentase biaya operasional kegiatan KKBPK di Kampung KB						100	912.672.000		-	-	-	100	912.672.000	DPPKBP3A
				Jumlah Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya								3	414.000.000			3	414.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB														
		1.1.5	Program Bina Ketahanan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga %	75		250.000.000	71	149.440.000							71	399.440.000	DPPKBP3A
		1.1.5.1	Pembinaan Kader Bina Keluarga	Jumlah Kader Bina Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan Orang	2.350	335	250.000.000	470	149.440.000							805	399.440.000	DPPKBP3A
		1.1.6	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Cakupan anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB %	75		60.000.000	55	25.000.000							55	85.000.000	DPPKBP3A
		1.1.6.1	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS Orang	855	200	60.000.000	55	25.000.000							255	85.000.000	DPPKBP3A
		1.1.7	Program Kesehatan Reproduksi	Prevalensi Peserta Papsmeas %	3,5		70.000.000	3	41.950.500							3	111.950.500	DPPKBP3A
		1.1.7.1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	Jumlah Peserta Pap Smear peserta	3.025	700	70.000.000	225	41.950.500							925	111.950.500	DPPKBP3A
		1.1.8	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase Jangkauan pelayanan KB %	100		5.670.628.000	100	808.070.000							100	6.478.698.000	DPPKBP3A
		1.1.8.1	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan program KKBPK	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan, Kelengkapan sarana Kerja, Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK pada Balai Penyuluhan KB %		100	5.071.827.000									100	5.071.827.000	DPPKBP3A
		1.1.8.2	Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana	Jumlah Pengadaan Laptop unit		20	240.001.000									20	240.001.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		1.1.8.1	Pengadaan Sarana Kerja bgai PPKBD	Jumlah Pengadaan sarana kerja bagi PPKBD Paket	211	76	197.600.000	132	528.000.000							208	725.600.000	DPPKBP3A
		1.1.8.2	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Jumlah Alat Penyimpan Alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan KB unit	17	13	161.200.000	8	101.470.000							21	262.670.000	DPPKBP3A
		1.1.8.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Rumah data kependudukan	80			1	21.100.000							1	21.100.000	DPPKBP3A
		1.1.8.4	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK)	Jumlah pengadaan BKB Kit	24			15	75.000.000							15	75.000.000	DPPKBP3A
		1.1.8.5	Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK)	Jumlah pengadaan BKL Kit	24			15	82.500.000							15	82.500.000	DPPKBP3A
		1.1.9	Program Generasi Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	25		54.300.000	20	37.600.000							20	91.900.000	DPPKBP3A
		1.1.9.1	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	Jumlah PIK Baru yang akan dibentuk dan Lomba- Lomba PIK R	138	5	54.300.000	6	37.600.000							11	91.900.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga						65	1.061.074.600	65	3.505.680.000			135	4.566.754.600	DPPKBP3A
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga						73	1.036.324.600	73	3.484.680.000			219	4.520.974.600	DPPKBP3A
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibentuk dan mendapatkan pembinaan					4	16.000.000					4	16.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)															
			Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)									4	14.000.000			4	14.000.000	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi remaja						20	280.000.000					20	280.000.000	DPPKBP3A
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Dibentuk dan Mendapatkan Pembinaan									4	627.000.000			4	627.000.000	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kader Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan dan Biaya Operasional						235	122.025.000					235	122.025.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
				Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								235	2.833.180.000			235	2.833.180.000		
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pemberian Biaya Operasional Penanganan stunting					100	607.400.000					100	607.400.000	DPPKBP3A		
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					120	10.899.600					120	10.899.600	DPPKBP3A		
				Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								120	10.500.000			120	10.500.000	DPPKBP3A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga						65	24.750.000	65	21.000.000			135	45.750.000	DPPKBP3A
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta pertemuan dalam rangka Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						80	12.000.000					80	12.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								80	10.500.000			80	10.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Pembinaan dan peningkatan usaha UPPKS						80	12.750.000					80	12.750.000	DPPKBP3A
				Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								80	10.500.000			80	10.500.000	
																0	-	
Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.1.1	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Swasta %	45		120.000.000	40		0						40	120.000.000	DPPKBP3A
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat melalui kesetaraan gender perlindungan		2.1.1.1	Kegiatan bimbingan manajemen usaha abagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam mengelola Usaha Orang	880	180	55.000.000	160		0						340	55.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
perempuan dan anak																		
		2.1.1.2	Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	Jumlah Peserta Pembinaan Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita Orang	800	180	40.000.000	80	0							260	40.000.000	DPPKBP3A
		2.1.1.3	Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Orang			25.000.000								0	25.000.000	DPPKBP3A	
															0	-		
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		2.2.1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak %	80		90.000.000	100	58.080.000							100	148.080.000	DPPKBP3A
		2.2.1.1	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	Jumlah Dokumen Indikator KLA Yang Disusun Dokumen	5	1	90.000.000	1	58.080.000							2	148.080.000	DPPKBP3A
		2.2.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Korban KDRT Yang Mendapatkan Penanganan %	100		190.000.000	100	83.120.000							100	273.120.000	DPPKBP3A
		2.2.2.1	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG; Profil Data Gender dan Anak Dokumen	9	1	50.000.000	1	24.580.000							2	74.580.000	DPPKBP3A
		2.2.2.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah Korban KDRT Yang Difasilitasi Orang	490	100	120.000.000	90	58.540.000							190	178.540.000	DPPKBP3A
		2.2.2.3	Penyusunan Profil Gender dan Anak	Jumlah Dokumen profil data gender yang disusun Dokumen		1	20.000.000									1	20.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan						1	88.750.000	1	50.500.000			2	139.250.000	DPPKBP3A
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan						1	88.750.000	1	50.500.000			2	139.250.000	DPPKBP3A
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan yang difasilitasi dan didampingi						100	88.750.000					100	88.750.000	DPPKBP3A
				Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								1	50.500.000			1	50.500.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA						76	58.750.000	76	50.000.000			152	108.750.000	DPPKBP3A
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Untuk tercapainya KLA						76	58.750.000	76	50.000.000			152	108.750.000	DPPKBP3A
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						150	58.750.000					150	58.750.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								1	50.000.000			2	135.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan SDM Masyarakat tentang Bahaya Kekerasan									451.800.000				451.800.000	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan								10	112.950.000			10	112.950.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM pada Masyarakat								10	112.950.000			10	112.950.000	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan								27	262.044.000			27	262.044.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Kekerasan yang Ditangani								27	262.044.000			27	262.044.000	
			Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah Kegiatan Manajemen SDM								3	76.806.000			3	76.806.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
			Daerah Kabupaten/Kota																
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah KABUPATEN/Kota	Penigkatan Kapasitas SDM Pelayanan Kasus								3	76.806.000				3	76.806.000	
	Meningkatnya Rasio KDRT		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta						43	62.125.000	43	49.000.000				86	111.125.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta						2	26.625.000	2	21.000.000				4	47.625.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Peserta dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						150	26.625.000						150	26.625.000	DPPKBP3A
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG								2	21.000.000				2	21.000.000	
	Meningkatnya Persentase Perempuan di lembaga pemerintah		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta						1	35.500.000	1	28.000.000				2	61.500.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Proporsi Kursi yang diduduki		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah peserta sosialisasi partisipasi perempuan						60	35.500.000						60	35.500.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	perempuan di DPR		Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi															
				Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan									40	28.000.000			40	28.000.000
	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rutin	1.1.1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu %	100		85.000.000	100	25.000.000							100	110.000.000	DPPKBP3A
		1.1.1.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen	45	9	30.000.000	9	15.000.000							18	45.000.000	DPPKBP3A
		1.1.1.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah Dokumen	15	200	10.000.000	3	10.000.000							203	20.000.000	DPPKBP3A
		1.1.1.3	Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA (Rakerda)	Jumlah Peserta Evaluasi dan Rencana Operasional Program PPKB dan PPPA Orang	950	3	45.000.000	150	0							153	45.000.000	DPPKBP3A
		2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi %	100		509.620.000	100	153.071.750							100	662.691.750	DPPKBP3A
		2.1.2.1	Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah Genre Kit untuk Kelompok PIK Remaja Paket	15	6	184.620.000	3	0							9	184.620.000	DPPKBP3A
		2.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli unit	79	3	50.000.000	3	0							6	50.000.000	DPPKBP3A
		2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara unit	39	19	150.000.000	7	53.671.750							26	203.671.750	DPPKBP3A
		2.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara unit	8	8	125.000.000	8	99.400.000							16	224.400.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3.1.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Skor	82		515.000.000	81	375.090.361							81	890.090.361	DPPKBP3A
		3.1.3.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100	100	350.000.000	100	295.830.000							200	645.830.000	DPPKBP3A
		3.1.3.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Masyarakat Dokumen	5	1	15.000.000	1	0							2	15.000.000	DPPKBP3A
		3.1.3.3	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Aparatur %	100	100	150.000.000	100	79.260.361							200	229.260.361	DPPKBP3A
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat						80	4.625.746.394	80	5.144.592.295			160	9.770.338.689	DPPKBP3A
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat						14	22.500.000	14	60.000.000			28	82.500.000	DPPKBP3A
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan , perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan						8	10.000.000	8	25.000.000			16	35.000.000	DPPKBP3A
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan , perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan						6	12.500.000	6	35.000.000			12	47.500.000	DPPKBP3A
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat						12	3.282.505.994	12	2.976.633.395			24	6.259.139.389	DPPKBP3A
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji						12	3.272.505.994					12	3.272.505.994	DPPKBP3A
				Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								12	2.966.633.395			12	2.966.633.395	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah penyusunan Laporan Keuangan						2	10.000.000	2	10.000.000			4	20.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD																
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat						12	118.498.150	12	240.678.900			24	359.177.050	DPPKBP3A	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	3.199.850					12	3.199.850	DPPKBP3A	
				Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								12	8.190.650			12	8.190.650		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	19.999.950					12	19.999.950	DPPKBP3A	
				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								12	105.000.000			12	105.000.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	20.498.750					12	20.498.750	DPPKBP3A	
				Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								12	18.000.000			12	18.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	9.199.800					12	9.199.800	DPPKBP3A	
				Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor								12	17.248.250			12	17.248.250		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	8.499.800					12	8.499.800	DPPKBP3A	
				Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								12	14.000.000			12	14.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	2.100.000					12	2.100.000	DPPKBP3A	
				Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan								12	3.240.000			12	3.240.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
				Peraturan Perundang-undangan															
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar Daerah						12	55.000.000					12	55.000.000		DPPKBP3A
				Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								12	75.000.000			12	75.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat						12	55.000.000	13	510.000.000		-	25	565.000.000		DPPKBP3A
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana/Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga						12	55.000.000					12	55.000.000		DPPKBP3A
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan								7	210.000.000			7	210.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Kelengkapan Balai Penyuluhan								6	300.000.000			6	300.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat						12	564.598.400	12	630.280.000			36	1.194.878.400		DPPKBP3A
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	26.998.500	12	22.500.000			24	49.498.500		DPPKBP3A
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran						12	537.599.900					12	537.599.900		DPPKBP3A
				Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								12	607.780.000			12	607.780.000		
			Pemeliharaan Barang Milik	Indeks Kepuasan Masyarakat						12	582.643.850	12	727.000.000			24	1.309.643.850		DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional						3	58.400.000					3	58.400.000		DPPKBP3A
				Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								12	60.000.000			12	60.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional						5	36.600.000					5	36.600.000		DPPKBP3A
				Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								12	37.000.000			12	37.000.000		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Balai Penyuluhan yang direhabilitasi (Dak Fisik), jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor						5	487.643.850					5	487.643.850		DPPKBP3A
				Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								19	650.000.000			19	650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						Target	Rp.	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1.1.1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan %										100	355.000.000	100	355.000.000	DPPKBP3A		
Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui Pengendalian Penduduk				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase ketersediaan Data kependudukan										100	220.000.000	300	263.500.000	DPPKBP3A	
				Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen penguatan Kerjasama pelaksanaan pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal										1	220.000.000	1	220.000.000		
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data kependudukan											100	135.000.000	100	135.000.000	DPPKBP3A
				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga											1	60.000.000	1	60.000.000	
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga											1	75.000.000	1	75.000.000	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR											73,02	1.281.576.000	73,02	1.281.576.000	DPPKBP3A
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR											100	50.000.000	100	50.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Target	Rp.												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										12	50.000.000	12	50.000.000		
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR										100	1.021.576.000	100	1.021.576.000	DPPKBP3A	
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										3	50.000.000	3	50.000.000		
			Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah yang Mengikuti Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											1378	971.576.000	1378	971.576.000	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR										73	170.000.000	219	4.781.346.300	DPPKBP3A	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode											200	55.000.000	200	55.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kontrasepsi Jangka Panjang														
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP										20	25.000.000	20	25.000.000	
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB										70	20.000.000	70	20.000.000	
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan										225	70.000.000	225	70.000.000	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Tenaga Lini Lapangan yang Kompeten / Persentase Capaian CPR										63	40.000.000	63	40.000.000	DPPKBP3A
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										3	40.000.000	3	40.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga										65	260.000.000	65	260.000.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga										73	210.000.000	73	210.000.000	DPPKBP3A
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk										4	30.000.000	4	30.000.000	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										235	160.000.000	235	160.000.000	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										120	20.000.000	120	20.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga										65	50.000.000	65	50.000.000	DPPKBP3A
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										80	15.000.000	80	15.000.000	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										80	15.000.000	80	15.000.000	
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										1	20.000.000	1	20.000.000	DPPKBP3A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						Target	Rp.	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																0	-			
Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi masyarakat melalui kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan										1	150.000.000	1	150.000.000	DPPKBP3A		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Kekerasan kepada Perempuan											1	150.000.000	1	150.000.000	DPPKBP3A	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												1	150.000.000	1	150.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Untuk tercapainya KLA												76	85.000.000	76	85.000.000	DPPKBP3A
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Untuk tercapainya KLA												76	85.000.000	76	85.000.000	DPPKBP3A
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha												1	85.000.000	1	85.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Meningkatnya Rasio KDRT		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta										43	85.000.000	43	85.000.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta										2	40.000.000	2	40.000.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota										2	40.000.000	2	40.000.000	
	Meningkatnya Persentase Perempuan di lembaga pemerintah		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif , Pemerintah dan Swasta										1	45.000.000	3	108.500.000	DPPKBP3A
	Meningkatnya Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota										1	45.000.000	1	45.000.000	
	Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rutin		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat										80	3.199.599.239	80	3.199.599.239	DPPKBP3A
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat										14	86.750.000	14	86.750.000	DPPKBP3A
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										8	42.750.000	8	42.750.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6	44.000.000	6	44.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat										12	1.848.463.319	12	1.848.463.319	DPPKBP3A
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										12	1.838.463.319	12	1.838.463.319	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD										2	10.000.000	2	10.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat										12	349.271.920	12	349.271.920	DPPKBP3A
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										12	7.190.650	12	7.190.650	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										12	198.793.020	12	198.793.020	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan										12	18.000.000	12	18.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	17	18									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										12	12.248.250	12	12.248.250	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan										12	9.500.000	12	9.500.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan										12	3.540.000	12	3.540.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										12	100.000.000	12	100.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat										12	810.114.000	12	810.114.000	DPPKBP3A
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12	21.500.000	12	21.500.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										12	788.614.000	12	788.614.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat										12	105.000.000	12	105.000.000	DPPKBP3A
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya										12	65.000.000	12	65.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya										12	40.000.000	12	4.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Perangkat Daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 28 berikut ini.

Tabel.28
Indikator Kinerja Dinas PPKB PPPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target RPJMD					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
				201 9	202 0	202 1	202 2	2023		
A.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.17	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	2.13	Dinas PPKB & P3A
2	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20.01	20.10	20.30	20.50	20.80	21	21	Dinas PPKB & P3A
3	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)	%	8,25	8.00	8.00	7.80	7.80	7.50	7.50	Dinas PPKB & P3A
B.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Ratio KDRT	angka	72,32	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	Dinas PPKB & P3A
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	78.55	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	Dinas PPKB & P3A
3	Persentase Capaian Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	653,95	670	680	690	700	710	710	Dinas PPKB & P3A
4	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	4,74	4,76	4,77	4,78	4,79	4,80	4,82	Dinas PPKB & P3A
5	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	6,67	6,67	7,67	8,67	9,67	10,67	10,67	Dinas PPKB & P3A
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	95,25	76,92	77,01	77,25	77,55	77,91	76,92	Dinas PPKB & P3A

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program/kegiatan/sub kegiatan, penting buntut memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, - - 2021

KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN MAGETAN

Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660421 199001 2 013